

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Kebijakan Mitigasi Banjir Pada Peraturan No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Pada Pasal 35 Tentang Mitigasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan

Pada pembahasan ini peneliti akan membahas mengenai terkait hasil penelitian Implementasi Kebijakan Mitigasi Banjir Pada Peraturan No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Pada Pasal 35 Tentang Mitigasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan dengan menyesuaikannya dengan teori-teori yang berada di dalam literatur model implementasi *George C. Edward III*. Adapun pembahasan terkait hasil tersebut adalah sebagai berikut:

5.1.1 Komunikasi

Komunikasi yang efektif memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak yang terkait. Agar implementasi berjalan dengan efektif, mereka yang bertanggung jawab untuk menegakkan keputusan tersebut harus mengetahui apakah mereka dapat melakukan hal tersebut. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang sangat rumit dan kompleks. Selain itu, sumber informasi yang berbeda juga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor komunikasi yang terjadi pada Implementasi Kebijakan Mitigasi Banjir Pada Peraturan No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Pada Pasal 35 Tentang Mitigasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan. Proses penyampaian Informasi pada Implementasi Mitigasi Banjir Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35 tentang Mitigasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan bahwa penyampaian informasi itu dilakukan pada saat melakukan forum pertemuan dan membentuk kelompok siaga bencana.

Setelah melakukan pertemuan para petugas BPBD bertugas menjelaskan kembali kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami inti dari peraturan tersebut. Dari pemaparan data dengan informan yang menyatakan bahwa transmisi dilakukan dengan cara melakukan forum pertemuan dinilai tepat, forum pertemuan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Implementasi Mitigasi Banjir Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35 tentang Mitigasi. Maka transmisi yang terjadi sesuai dengan ungkapan *George C. Edward III*, yang menyatakan bahwa kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan serta dengan penyampaian yang baik. Peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi pada Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35 tentang Mitigasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan masih kurang berjalan dengan baik. Indikasi dari hal tersebut adalah masyarakat Kota Tangerang Selatan masih belum mengetahui tentang Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35 tentang Mitigasi. Hal yang harus dilakukan dalam implementasi kebijakan mitigasi banjir ini adalah dengan melakukan beberapa solusi yaitu:

1. Komunikasi yang terencana dan terstruktur:
 - a. Penyampaian informasi: Informasi tentang bencana, langkah mitigasi, dan prosedur darurat harus disampaikan secara jelas dan konsisten.
 - b. Koordinasi: Ada koordinasi yang baik antara BPBD, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat.
2. Penyampaian Informasi yang Tepat Waktu:
 - a. Sistem Peringatan Dini: Sistem peringatan dini harus berfungsi dengan baik untuk memberikan informasi awal kepada masyarakat.
 - b. Media Komunikasi: Informasi harus disebarkan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, radio, televisi, dan media cetak.

3. Kejelasan dan Keterpahaman Informasi:

- a. Bahasa Sederhana: Materi komunikasi harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.
- b. Format Informasi: Informasi harus disajikan dalam format yang mudah dipahami, seperti infografis, video, dan panduan praktis.

Untuk mewujudkan kondisi yang Ideal diperlukan perencanaan matang serta koordinasi yang efisien seperti:

1. Pengembangan Sistem Komunikasi Terpadu:

- a. Implementasi Platform Digital: Mengembangkan platform komunikasi terpadu yang mengintegrasikan berbagai saluran, seperti website, aplikasi mobile, dan media sosial untuk penyampaian informasi yang konsisten dan cepat.
- b. Koordinasi dengan Media Lokal: Bekerjasama dengan media lokal dan komunitas untuk memastikan informasi menjangkau seluruh masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil.

2. Peningkatan Kualitas Informasi:

- a. Penggunaan Bahasa yang Sederhana: Menyusun panduan dan materi komunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Menggunakan grafik, infografis, dan video untuk menjelaskan informasi secara visual.
- b. Pendidikan dan Pelatihan: Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi petugas dan masyarakat mengenai penanggulangan bencana dan penggunaan sistem informasi.

3. Peningkatan Sistem Peringatan Dini:

- a. Teknologi Peringatan: Mengadopsi teknologi terbaru untuk sistem peringatan dini, seperti aplikasi yang dapat mengirimkan notifikasi langsung ke ponsel masyarakat.
- b. Latihan Rutin: Melakukan simulasi dan latihan rutin untuk menguji efektivitas sistem peringatan dini dan kesiapan masyarakat dalam merespons bencana.

4. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat:

- a. Forum Komunikasi: Mendirikan forum komunikasi di tingkat komunitas untuk membahas isu-isu penanggulangan bencana dan menerima masukan dari masyarakat.

Dengan penerapan solusi konkret ini, diharapkan penggunaan sumber daya dalam penanggulangan bencana dapat dilakukan secara optimal dan efektif, mendukung kesiapsiagaan dan respons yang lebih baik terhadap bencana di Tangerang Selatan.

5.1.2 Sumber Daya

Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor Sumber daya yang terdapat dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35 tentang Mitigasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa dukungan sumber daya yang memadai dan terkoordinasi dengan baik. Sumber daya ini mencakup sejumlah aspek penting, yang masing-masing memainkan peran penting dalam memastikan implementasi kebijakan yang efektif. Pertama, dana diperlukan untuk membiayai semua kegiatan terkait kebijakan. Hal ini mencakup biaya operasional, gaji, perolehan peralatan dan bahan yang diperlukan, serta biaya lain yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa pendanaan yang memadai, banyak program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau terhenti sehingga memberikan hasil yang kurang optimal. Kedua, sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih merupakan kunci implementasi kebijakan. Karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat dapat melakukan tugas yang diperlukan secara efektif. Penting juga untuk melatih dan mengembangkan staf agar selalu siap menghadapi tantangan dan perubahan yang muncul selama proses implementasi. Ketiga, infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses kerja sangatlah penting. Ini mencakup fasilitas fisik seperti gedung, peralatan teknis dan jaringan komunikasi. Infrastruktur yang baik menjamin seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan lancar dan efisien serta tanpa hambatan yang tidak perlu.

Berdasarkan penjelasan di atas, sarana prasarana pelayanan merupakan salah satu hal penting dalam menjamin mutu layanan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35 tentang Mitigasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan. Sehingga belum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan harapan, karena sarana prasarana yang dibutuhkan sekolah dalam pelaksanaan SOP rekomendasi pemanfaatan taman belum semua terpenuhi. Sehingga hal ini belum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa sumber daya non manusia berupa sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam implementasi.

Untuk mencapai kondisi ideal dalam penggunaan sumber daya dalam penanggulangan bencana, beberapa aspek harus diperhatikan:

1. Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya:
 - a. Sumber Daya Manusia: Memiliki personel yang cukup, terlatih, dan berkualitas di BPBD dan instansi terkait.
 - b. Peralatan dan Infrastruktur: Tersedia peralatan modern dan infrastruktur yang memadai untuk penanggulangan bencana, seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, dan fasilitas penyimpanan logistik.
2. Pengelolaan Anggaran:
 - a. Alokasi Anggaran: Anggaran penanggulangan bencana harus memadai, terencana, dan dialokasikan dengan efektif sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan anggaran harus transparan dan akuntabel untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan penggunaan yang optimal.
3. Koordinasi Antar Instansi:
 - a. Sinergi: Koordinasi yang baik antara BPBD, pemerintah daerah, instansi terkait, dan organisasi non-pemerintah.

- b. Protokol: Adanya protokol dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk kerjasama dan alur komunikasi antara berbagai pihak.

4. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas:

- a. Pelatihan Berkala: Program pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan personel dalam penanggulangan bencana.
- b. Pengembangan Kapasitas: Inisiatif untuk terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan tim dalam menghadapi bencana yang semakin kompleks.

Selain mewujudkan kondisi yang ideal, penting untuk memastikan keberlanjutan dan adaptasi terhadap perubahan, serta mengevaluasi secara berkala hasil dan proses untuk perbaikan yang berkelanjutan sebagai berikut:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia:

- a. Rekrutmen dan Pelatihan: Menambah jumlah personel BPBD dan memastikan mereka mendapatkan pelatihan berkala mengenai penanggulangan bencana. Memanfaatkan pelatihan dari lembaga yang berpengalaman di bidang ini.
- b. Peningkatan Kesejahteraan: Meningkatkan kesejahteraan dan motivasi personel melalui insentif, penghargaan, dan kondisi kerja yang baik.

2. Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan:

- a. Inventarisasi dan Pembelian: Menyusun inventaris peralatan yang diperlukan dan melakukan pembelian peralatan yang diperlukan, seperti peralatan komunikasi, kendaraan operasional, dan alat pertolongan pertama.
- b. Pemeliharaan: Menetapkan jadwal pemeliharaan rutin dan perbaikan untuk memastikan peralatan selalu dalam kondisi baik.

3. Pengelolaan Anggaran yang Efisien:

- a. Perencanaan Anggaran: Menyusun rencana anggaran yang rinci dan berbasis pada kebutuhan aktual. Mengalokasikan dana sesuai prioritas dan kebutuhan mendesak.
 - b. Audit dan Transparansi: Melakukan audit anggaran secara berkala dan memastikan laporan keuangan transparan. Memastikan adanya mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan.
4. Koordinasi dan Kerjasama:
- a. Penyusunan Protokol: Menyusun dan mendokumentasikan protokol koordinasi dan SOP antara BPBD, instansi terkait, dan organisasi non-pemerintah.
 - b. Forum Koordinasi: Mengadakan forum atau rapat koordinasi secara rutin untuk membahas kesiapan dan tanggapan terhadap bencana.

Melalui penerapan solusi konkret ini, diharapkan penggunaan sumber daya dalam penanggulangan bencana dapat dilakukan secara optimal dan efektif, mendukung kesiapsiagaan serta respons yang lebih baik terhadap bencana di Tangerang Selatan.

5.1.3 Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana. Aspirasi perilaku atau karakteristik pelaksana kebijakan memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan ditinjau dari tujuan atau sasarannya. Karakter penting yang harus dimiliki pengambil kebijakan adalah kejujuran dan komitmen yang tinggi. Berdasarkan data hasil penelitian dapat diamati dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa sikap pelaksanaan dalam Implementasi Kebijakan Mitigasi Banjir pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35 tentang Mitigasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan belum cukup baik.

Berdasarkan hal di atas, peneliti menyimpulkan bahwa jika para pelaksana merasa senang terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, maka besar kemungkinan mereka akan melaksanakan kebijakan

tersebut sesuai dengan keinginan pengambil keputusan. Selain itu, jika perilaku atau pandangan para pelaksana kebijakan berbeda dengan pengambil keputusan, maka proses implementasi kebijakan menjadi semakin kompleks.

Dalam konteks penanggulangan bencana, sikap pelaksana melibatkan sikap dan perilaku personel yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi ideal dari sikap pelaksana meliputi:

1. Komitmen dan Dedikasi:
 - a. Keterlibatan Penuh: Pelaksana harus memiliki komitmen penuh terhadap tugas mereka dan memahami pentingnya peran mereka dalam penanggulangan bencana.
 - b. Kepatuhan pada Prosedur: Mematuhi SOP dan protokol yang ditetapkan untuk memastikan respon yang efektif dan terkoordinasi.
2. Profesionalisme:
 - a. Kualitas Kerja: Menunjukkan keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam menjalankan tugas mereka.
 - b. Etika Kerja: Mengikuti standar etika dan profesionalisme dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.
3. Kesiapan dan Kesiapsiagaan:
 - a. Respon Cepat: Mampu merespon situasi bencana dengan cepat dan efektif.
 - b. Latihan Rutin: Aktif berpartisipasi dalam latihan dan simulasi untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai skenario bencana.
4. Komunikasi dan Koordinasi:
 - a. Komunikasi Efektif: Mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan rekan kerja, instansi terkait, dan masyarakat.
 - b. Kerjasama Tim: Berkolaborasi dengan baik dalam tim dan menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan pihak lain yang terlibat.

Agar dapat mencapai kondisi yang ideal, perlu diterapkan pendekatan yang sistematis, melibatkan semua pihak terkait, serta melakukan penyesuaian dan evaluasi secara berkala untuk mengatasi berbagai tantangan dan perubahan yang muncul.

1. Penguatan Pelatihan dan Pendidikan:
 - a. Pelatihan Berkala: Menyusun program pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaksana mengenai penanggulangan bencana. Pelatihan harus mencakup skenario bencana yang beragam dan teknik respons terbaru.
 - b. Pendidikan tentang Etika dan Profesionalisme: Menyediakan pelatihan khusus mengenai etika kerja dan profesionalisme untuk memastikan pelaksana memahami standar yang diharapkan.
2. Motivasi dan Insentif:
 - a. Pemberian Insentif: Menawarkan insentif dan penghargaan untuk pelaksana yang menunjukkan dedikasi dan kinerja yang baik. Ini dapat mencakup bonus, sertifikat penghargaan, atau promosi.
 - b. Kesejahteraan Kerja: Meningkatkan kondisi kerja dan menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksana dalam menjalankan tugas mereka dengan optimal.
3. Peningkatan Prosedur dan SOP:
 - a. Penyusunan dan Pembaharuan SOP: Menyusun, mendokumentasikan, dan memperbarui SOP secara berkala untuk memastikan kejelasan dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Sosialisasi Prosedur: Mengadakan sosialisasi mengenai prosedur dan protokol baru untuk memastikan semua pelaksana memahami dan dapat mematuhi mereka.
4. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Simulasi:
 - a. Simulasi dan Latihan: Melakukan simulasi dan latihan secara rutin untuk memastikan pelaksana dapat merespons bencana dengan efektif. Latihan ini harus mencakup berbagai skenario bencana untuk menguji kesiapsiagaan mereka.
 - b. Penilaian Kinerja: Mengadakan penilaian kinerja setelah simulasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam respon bencana.

Sebagai hasil penerapan solusi konkret ini, diharapkan struktur birokrasi dalam penanggulangan bencana dapat berfungsi secara optimal, memfasilitasi koordinasi yang baik, serta memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien.

5.1.4 Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat standar operational procedure kebijakan yang dibuat dan berjalan secara sistematis. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35 telah diatur dalam standar operasional prosedur.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35 bahwa standar operasional prosedur sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dengan adanya prosedur-prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh *George C. Edward III* yang mengatakan bahwa dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat di dalam organisasi. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa SOP dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35 tentang Mitigasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan ini cukup baik dilihat dari aspek SOP yang telah memuat tugas dan tanggungjawab dari setiap pelaksana

Struktur birokrasi yang ideal untuk mitigasi bencana harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan efektif, serta memfasilitasi koordinasi yang baik antara berbagai pihak. Berikut adalah elemen-elemen utama dari struktur birokrasi yang ideal:

1. Klaritas Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Deskripsi Jabatan yang Jelas: Setiap posisi dalam struktur birokrasi harus memiliki deskripsi jabatan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawabnya.
 - b. Penugasan Tugas: Pembagian tugas harus jelas untuk memastikan setiap orang memahami peran mereka dalam penanggulangan bencana.
2. Hierarki dan Jalur Komunikasi:
- c. Hierarki yang Tepat: Struktur birokrasi harus memiliki hierarki yang memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan efektif.
 - d. Jalur Komunikasi: Jalur komunikasi harus ditetapkan untuk memastikan informasi dapat mengalir dengan lancar dari tingkat atas ke bawah dan sebaliknya.
3. Koordinasi Antar Instansi:
- a. Pengaturan Koordinasi: Terdapat mekanisme koordinasi yang efektif antara BPBD, instansi pemerintah lainnya, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat.
 - b. Forum Koordinasi: Pembentukan forum koordinasi yang melibatkan semua pihak terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.
4. Keputusan dan Pengawasan:
- a. Pengambilan Keputusan: Mekanisme pengambilan keputusan harus melibatkan pihak yang berkompeten dan memungkinkan respons yang cepat dalam situasi darurat.
 - b. Pengawasan: Adanya sistem pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur diikuti dengan benar.
5. Sumber Daya dan Dukungan:
- a. Alokasi Sumber Daya: Struktur birokrasi harus memastikan bahwa sumber daya (manusia, finansial, dan material) dialokasikan secara efektif untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana.

- b. Dukungan Logistik: Penyediaan dukungan logistik yang memadai, termasuk peralatan dan fasilitas, untuk mendukung operasi penanggulangan bencana.

Solusi Konkrit untuk Mewujudkan Kondisi Ideal:

1. Perumusan dan Penegasan Struktur Organisasi:
 - a. Penyusunan Struktur: Menyusun struktur organisasi yang jelas dengan deskripsi jabatan dan tanggung jawab yang spesifik untuk setiap posisi.
 - b. Penetapan Hierarki: Menetapkan hierarki yang memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan efektif dalam situasi darurat.
2. Pengembangan Protokol Koordinasi
 - a. Mekanisme Koordinasi: Mengembangkan mekanisme koordinasi antara BPBD dan instansi terkait, termasuk pembentukan kelompok kerja dan forum koordinasi reguler.
 - b. Protokol Koordinasi: Menyusun dan mendokumentasikan protokol untuk kerjasama antar instansi dan pihak terkait lainnya.
3. Pelatihan tentang Prosedur Birokrasi:
 - a. Pelatihan Internal: Menyelenggarakan pelatihan bagi personel tentang prosedur birokrasi, peran dan tanggung jawab mereka, serta jalur komunikasi yang harus diikuti.
 - b. Simulasi Bencana: Mengadakan simulasi bencana untuk menguji efektivitas struktur birokrasi dan koordinasi antara berbagai pihak.
4. Peningkatan Sistem Pengawasan:
 - a. Sistem Monitoring: Mendirikan sistem monitoring untuk memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan.

- b. Audit Berkala: Melakukan audit berkala untuk menilai efektivitas struktur birokrasi dan membuat perbaikan yang diperlukan.
5. Dukungan Sumber Daya dan Logistik:
- a. Rencana Alokasi Sumber Daya: Menyusun rencana alokasi sumber daya yang memadai dan memastikan bahwa semua kebutuhan logistik dapat dipenuhi.
 - b. Penyediaan Peralatan: Memastikan bahwa peralatan dan fasilitas yang diperlukan untuk penanggulangan bencana tersedia dan dalam kondisi baik.

Dengan menerapkan solusi konkret ini, diharapkan struktur birokrasi dalam penanggulangan bencana dapat berfungsi secara optimal, memfasilitasi koordinasi yang baik, dan memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien.